

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, H. Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Aspinal, E dan Sukmajadi, M. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patron dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Erwan Dan Diah. 2007. "*Metode Penelitian Kuantitatif*". Jogjakarta:Gaya Media
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Huda, N. 2009. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Ismawan, Indra. 1999. *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Kumolo, Thahjo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. PT Mizan Publika, Bandung.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Mawardi, I. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi diPemukada*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Rifai, Amzulian. 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban PidanaTinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana
- Saleh. (2017). *Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Ctk. Pertama*. Jakarta, Indonesia: Hukum Acara Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudijono, Sastroatmodjo. 2005. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy*
- Suryabrata, Sumadi. 1998.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali
- Topatimasang, Roem. 2011.*Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta: Maarif Institute

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Jurnal

Dedi Irawan, Studi Tentang Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan., eJournal Ilmu Pemerintahan., Volume 3, Nomor 4, 2015: 1725-1738

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)* (Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 2007. “ Analisis Yuridis Penerapan dan Pembentukan Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017” AI’Adl, Vol IX No 3

.Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI

D. Skripsi dan Thesis

Ginjar Wahyudi, 2011 “Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta)

Rimbang, Patrick J. 2014. *Money Politics* dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado tahun 2014. Skripsi. Manado : Universitas Sam Ratulangi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication”, *Tesis* (Perpustakaan Universitas Indonesia)

E. Media Elektronik

Andhika Prasetya, “117 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018”, <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-ilkada-serentak-27-juni-2018>, <http://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penanganan-pidana-beritasatu>.

<http://www.beritasatu.com/nasional/334527-bawaslu-temukan-265-pelanggaran-pilkada-di-jateng.html>

<http://pilkada.metrotvnews.com/read/2017/02/07/654339/pelanggaran-pemilu-di-jateng-diklaim-masih-minim>

Dian Utoro Aji, Bawaslu Jateng Telusuri Dugaan Money Politic Pilbup Kudus, terkait dengan postingan dugaan money politik di medsos dianggap bagaian dari Informasi. Apalagi ia mengakui, Bawaslu kesulitan untuk mencari pelaku money politik,

Girindra Samdino, “partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan pemilu”

www.kompas.com

N Nopyandri , “pemilihan kepala daerah secara langsung”,

www.media.neliti.com

Pan mohamad faiz , “memperkuat prinsip pemilu”, www.researchgate.net

damang averroes, “ perkembangan tindak pidana pemilu diindonesia” ,

www.negarahukum.com

Rizky Gozali , “*Daftar Perolehan Suara di Pilkada Kudus*

2018”, <http://jateng.tribunnews.com/2018/07/04/ini-daftar-perolehan-suara-di-pilkada-kudus-2018>,

[http://jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/12/inilah-daftar-lengkap-23-](http://jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/12/inilah-daftar-lengkap-23-pasangan-calon-di-pilkada-serentak-2018-di-jawa-tengah)

[pasangan-calon-di-pilkada-serentak-2018-di-jawa-tengah](http://jateng.tribunnews.com/amp/2018/01/12/inilah-daftar-lengkap-23-pasangan-calon-di-pilkada-serentak-2018-di-jawa-tengah)

Wahyu Putro A, Pemiihan Bupati Kudus Diwarnai Politik Uang,

<https://nasional.tempo.co/read/483318/pemilihan-bupati-kudus-diwarnai-politik-uang/full&view=ok>

www.kpu.go.id, “pengertian pemilihan umum”